

# Pedoman Penerapan APU & PPT Penyelenggara Transfer Dana dan KUPVA



Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran  
September 2017

# I. LATAR BELAKANG



# 1. National Risk Assessment (NRA)

NRA merupakan kajian penilaian risiko secara nasional atas Money Laundering/Terrorist Financing (ML/TF), sedangkan SRA merupakan penilaian risiko pada sektor tertentu.

## Latar Belakang

Rekomendasi No. 1 (R1) FATF: setiap negara harus mengidentifikasi, menilai dan memahami risiko ML/TF.

## I. Hasil Penilaian Risiko Terorist Financing

Berdasarkan **modus pendanaan**:

1. Sumbangan kepada yayasan
2. Penyalahgunaan yayasan
3. Berdagang
4. Kegiatan kriminal

Berdasarkan **profil pelaku usaha**:

1. Perorangan: pelajar/mahasiswa
2. Pelaku korporasi: yayasan/organisasi nirlaba

Penggunaan **Bitcoin & virtual currency** lainnya dalam melakukan transaksi keuangan menjadi salah satu **emerging threat** ML/TF

**NRA  
(2015)**

## II. Hasil Penilaian Risiko Money Laundering

A. Urutan berdasarkan **tindak pidana asal (Predicate Crime)**:

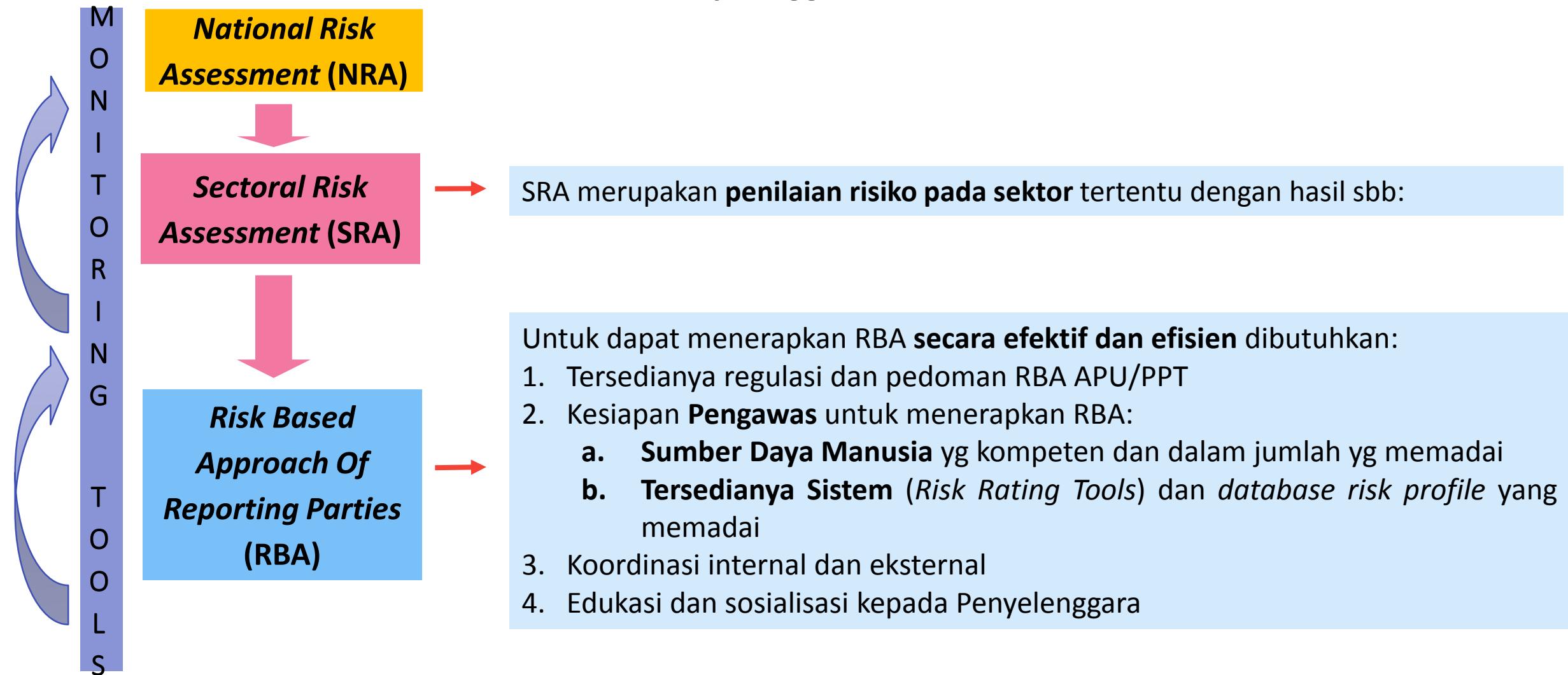
- |               |              |
|---------------|--------------|
| 1. Narkotika  | 4. Kehutanan |
| 2. Korupsi    | 5. Perbankan |
| 3. Perpajakan |              |

B. Berdasarkan kategori **Penyelenggara**:

1. **Risiko Tinggi:**  
Perbankan, pasar modal, agen properti, pedagang kendaraan bermotor
2. **Risiko Menengah:**  
Persh. pembiayaan, **KUPVA**, pedagang logam mulia, **PTD**, pedagang barang antik, balai lelang, asuransi
3. **Risiko Rendah:**  
Dana pensiun

## 2. Sectoral Risk Assessment (SRA)

Pada Mei 2017, BI tlh melakukan penilaian risiko TPPU untuk industri PTD dan KUPVA BB dlm bentuk kajian SRA. Hasil SRA tersebut dijadikan pedoman dlm penerapan RBA baik bagi Pengawas maupun Penyelenggara.



### 3. Sectoral Risk Assessment (SRA)

5

**Hasil SRA untuk sektor KUPVA BB berdasarkan 3 key risks**

KUPVA BB			
Risiko	Area	Customer	Produk
High	DKI Jakarta	Private Employee	USD
Medium	Kepulauan Riau & Bali	<ul style="list-style-type: none"><li>• Business Person</li><li>• Housewife</li></ul>	SGD
Low	DI Aceh, Riau, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, and Papua	Bank Employees, Money Changers Employees, PEPs, Political Party's Board Members, Government Employees, Professionals, Foundation's Board Members, Employees of SOE/RGOE, and Corporations	AUD, EUR, MYR, JPY, CNY, SAR, HKD, and THB

### 3. Sectoral Risk Assessment (SRA)

6

**Hasil SRA untuk sektor PTD BB berdasarkan 3 key risks**

PTD BB			
Risk	Area	Customer	Produk
High	DKI Jakarta and Jawa Timur	Private Employee	Incoming Transfer
Medium	Jawa Tengah	Business person, Housewife, and Foundation's Board Member	-
Low	DI Aceh, Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan, Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, and Papua	Bank employees, PVA Employees, PEPs, Political Party's Board Members, Government Employees, Professionals, Employees of SOE/RGOE, and Corporations	Outgoing and Domestic Transaction

#### *4. Publikasi NRA dan SRA*

<http://www.bi.go.id/id/perbankan/prinsip-mengenal-nasabah/contents/default.aspx>



***Tujuan penyusunan Pedoman RBA untuk penyelenggara adalah:***

**1**

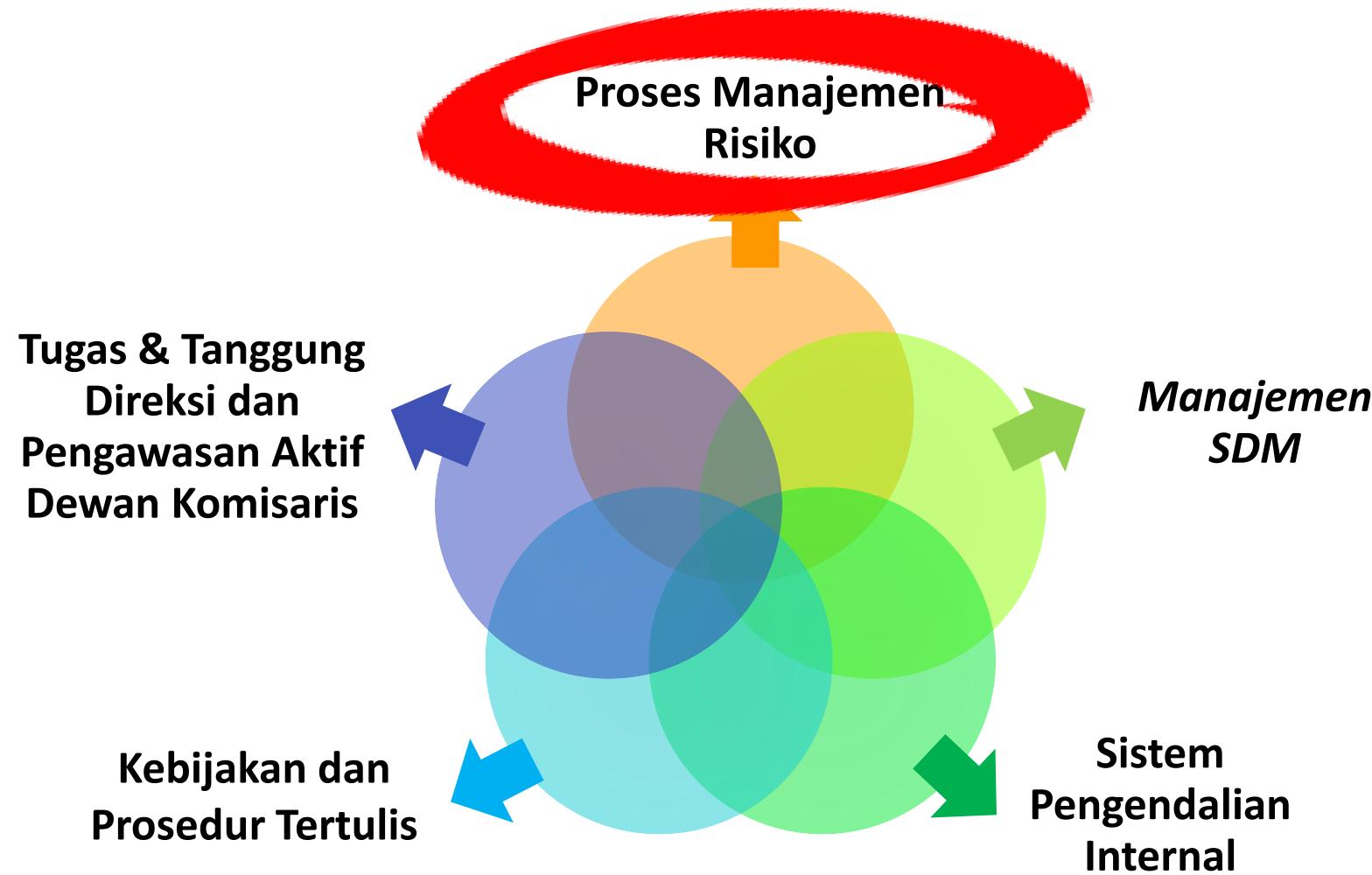
sebagai pedoman untuk mengidentifikasi, memahami dan melakukan langkah-langkah mitigasi risiko TPPU, TPPT dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal

**2**

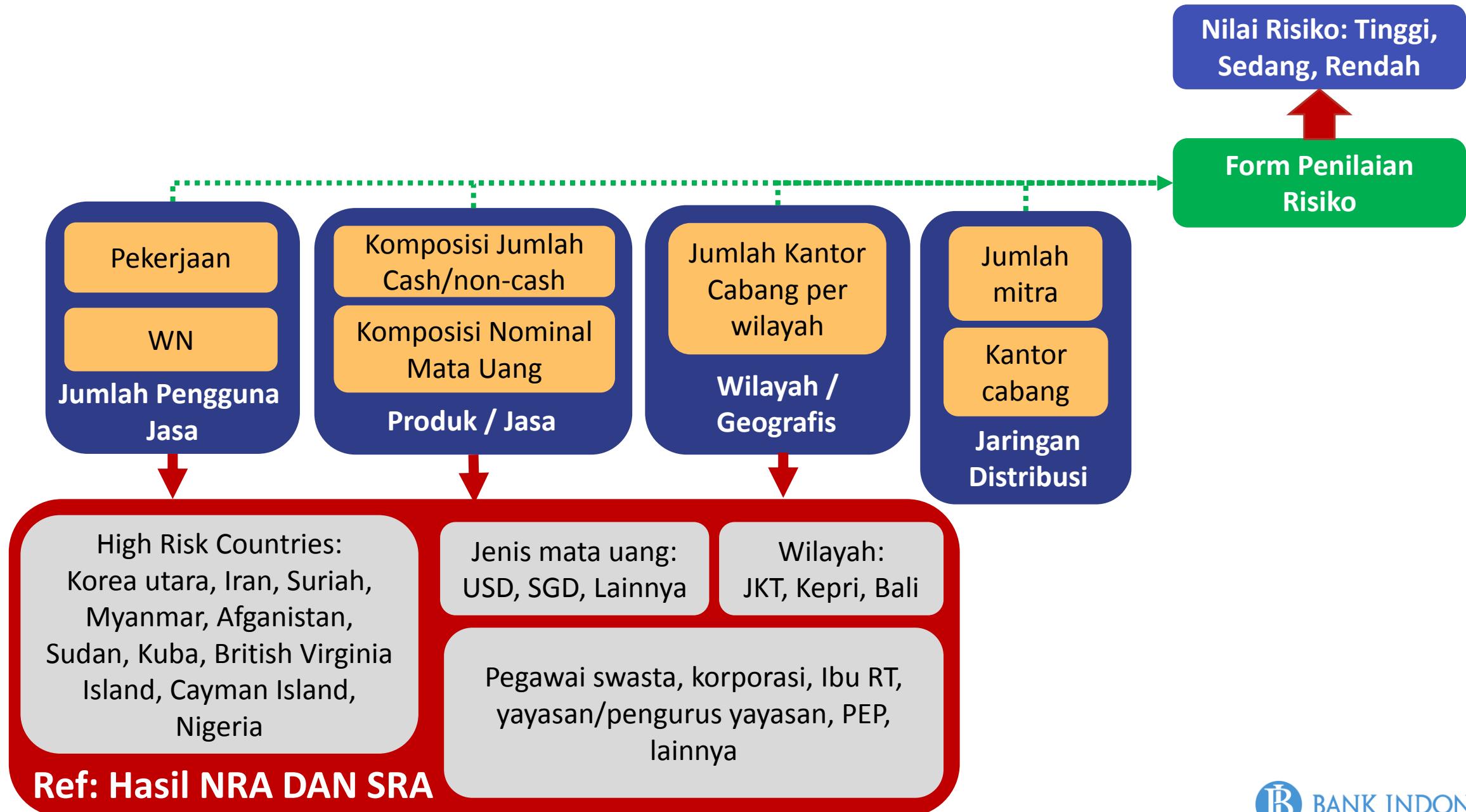
sebagai panduan teknis dalam kegiatan bisnis penyelenggara TD dan penyelenggara KUPVA Bukan Bank

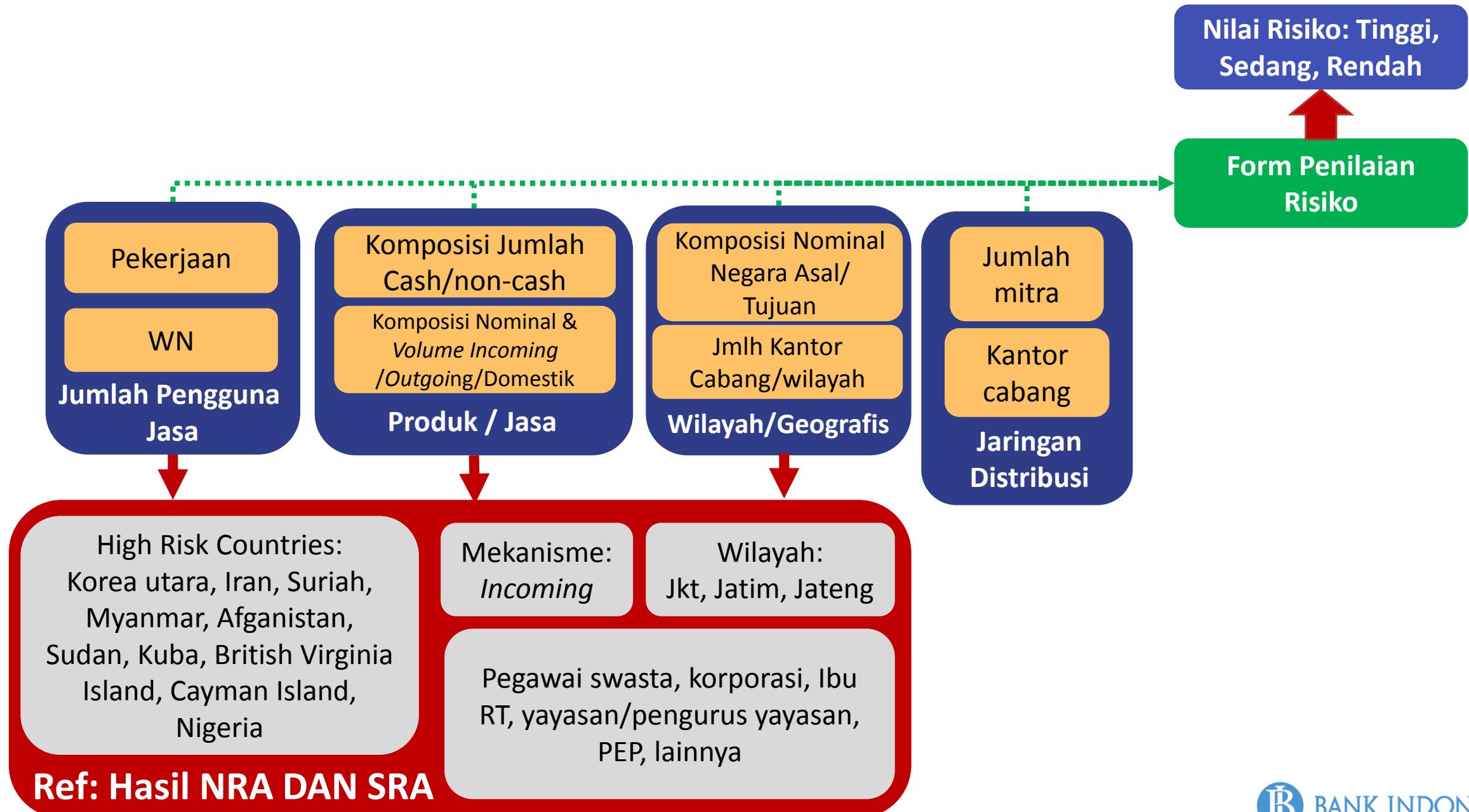
## II. PENERAPAN PROGRAM APU & PPT BERBASIS RISIKO











Tanggung jawab Direksi & Pengawasan Aktif Komisaris :

- Menetapkan kebijakan & prosedur
- Mekanisme laporan APU & PPT ke direksi
- dll

Kebijakan dan Prosedur:

- Materi sudah sesuai ketentuan
- Penerapan sudah sesuai kebijakan & prosedur
- Pemantauan TKM
- dll

## *Self-Assessment:*

Sangat baik  
Baik  
Cukup Baik  
Kurang Baik  
Tidak Baik

Proses Manajemen Risiko:

- Penilaian risiko
- dll

Manajemen SDM:

- Fungsi/PIC APU & PPT
- Pelatihan
- dll

Sistem Pengendalian Intern:

- Segregation of duty
- Audit internal
- dll



*Pengendalian merupakan langkah untuk meningkatkan predikat Self Assesment..*

*Semakin baiknya hasil Self Assesment menandakan baiknya penerapan program APU & PPT penyelenggara ....*



### 1. Perencanaan/Strategi

Penyelenggara menyusun strategi untuk memitigasi risiko yang dihadapi.

Misalnya:

- Pegawai cabang tidak perlu mengisi *field* pekerjaan, negara tujuan, kota asal secara manual untuk menghindari kesalahan pengisian mengingat penyelenggara mempunyai cabang yang banyak.
- pemantauan lebih ketat terhadap pengguna jasa yang merupakan warga negara berisiko tinggi.



### 2. Implementasi

Penyelenggara mengimplementasikan strategi mitigasi risiko

Misalnya:

- Memodifikasi aplikasi sehingga *field* pekerjaan, negara tujuan, kota asal diisi menggunakan *drop down list*.
- Mengembangkan aplikasi pemantauan yang dapat memfilter pengguna jasa berdasarkan negara tertentu



### 3. Pemantauan

Penyelenggara memantau hasil implementasi mitigasi risiko

Misalnya:

- Pantau kualitas hasil pengisian database profil pengguna jasa
- Pantau hasil analisis UKK mengenai transaksi mencurigakan.



### 4. Evaluasi

Penyelenggara melakukan evaluasi efektivitas langkah mitigasi risiko yang diterapkan.

Misalnya:

- Penambahan dropdown list dapat meningkatkan kualitas database profil pengguna jasa.
- Aplikasi pemantauan efektif membantu UKK dalam mengidentifikasi transaksi mencurigakan.

T ERIMA K ASIH